

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS
MONETER DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

ENDAH WAHYUNI
0311010025/ FE/ EP

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2009**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS
MONETER DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan



Oleh:

ENDAH WAHYUNI
0311010025/ FE/ EP

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2009**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS
MONETER DI KOTA SURABAYA**

USULAN PENELITIAN

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Jurusan Ekonomi Pembangunan



Oleh:

ENDAH WAHYUNI
0311010025/ FE/ EP

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2009**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera ,

Dengan memanjatkan puji syukur kepada allah SWT , atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penyusun sehingga skripsi ini yang berjudul “ **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter Di Kota Surabaya** “.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu , Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan , Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur .

Pada kesempatan ini penyusunan ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat ibu Dra . Ec . Niniek Imaningsih , Mp selaku dosen pembimbing skripsi dan semua pihak yang telah memberi bimbingan , petunjuk serta bantuan baik spiritual maupun materiil , khususnya kepada :

- 1 . Bapak Prof . Dr . Ir . Teguh , MP . Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur .
- 2 . Bapak Dr . Dhani Ichsanudin Nur , MM . Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur .
- 3 . Bapak Drs . Ec . Marseto DS , Msi . Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur .
- 4 . Para Dosen dan asistennya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur .

5 . Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun material .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna , oleh karena itu penulis sangat berharap saran dan kritik membangun dari pembaca dan pihak lain .

Akhir kata , Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan .

Wassalamualaikum Wr . Wb .

Surabaya , Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Pengertian Pajak.....	12
2.2.1.1. Jenis-Jenis Pajak.....	15
2.2.1.2. Fungsi Pajak.....	17
2.2.1.3. Tarif Pajak.....	18
2.2.1.4. Prinsip Pajak.....	19
2.2.1.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak.....	20

2.2.2. Pajak Daerah	21
2.2.2.1. Pengertian Daerah	21
2.2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	22
2.2.2.3. Pengertian Pajak Daerah	23
2.2.2.4. Ruang Lingkup Pajak Daerah	24
2.2.2.5. Dasar Hukum Pajak Daerah	24
2.2.3. Pajak Hiburan Sebagai Komponen Pajak Daerah	25
2.2.3.1. Pengertian Pajak Hiburan	25
2.2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan ..	26
2.2.4. Krisis Moneter	27
2.2.4.1. Pengertian Krisis Moneter	27
2.2.4.2. Dampak Krisis Moneter	27
2.2.5. Tingkat Inflasi	28
2.2.5.1. Definisi Inflasi	28
2.2.5.2. Penggolongan Inflasi	29
2.2.5.3. Cara Mengatasi Inflasi	34
2.2.6. Jumlah Tempat Hiburan	35
2.2.6.1. Subyek Pajak Hiburan	37
2.2.6.2. Obyek Pajak Hiburan	37
2.2.7. Pendapatan Perkapita	39
2.2.7.1. Pengertian Pendapatan Perkapita	39
2.2.7.2. Fungsi Pendapatan Perkapita	41
2.2.7.3. Ruang Lingkup Pendapatan Perkapita	42

	2.2.7.4. Pertumbuhan Pajak.....	42
	2.3. Kerangka Pikir	43
	2.4. Hipotesis.....	45
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	46
	3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	46
	3.2. Teknik Pengumpulan Sampel	47
	3.2.1 Studi Pustaka atau <i>Library Research</i>	47
	3.2.2 Studi Lapangan atau <i>Field Research</i>	47
	3.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	49
	3.3.1. Teknik Analisis	49
	3.3.2. Uji Hipotesis.....	50
	3.3.3. Asumsi Klasik	54
	3.3.4. Pendeteksian BLUE (<i>Best Linier Unbiased Estimator</i>).....	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
	4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	60
	4.1.1. Sejarah Singkat Kota Surabaya	60
	4.1.2. Logo dan Arti Logo Kota Surabaya	62
	4.1.3. Geografi.....	63
	4.1.4. Demografi.....	65
	4.1.5. Visi dan Misi Kota Surabaya	66
	4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	70
	4.2.1. Deskripsi Variabel Tingkat Inflasi	70

4.2.2.	Deskripsi Variabel Jumlah Tempat Hiburan	71
4.2.3.	Deskripsi Pendapatan Perkapita	73
4.2.4.	Deskripsi Penerimaan Pajak Hiburan.....	74
4.3.	Hasil Analisis dan Uji Hipotesis	75
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas.....	75
4.3.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	75
4.3.3.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda dengan Variabel Dummy	79
4.3.4.	Uji Hipotesis.....	81
4.3.4.1.	Uji Kesesuaian Model.....	81
4.3.4.2.	Uji Hipotesis	82
4.4.	Pembahasan.....	83
4.4.1.	Implikasi Penelitian.....	83
4.4.2.	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	86
4.4.3.	Keterbatasan Penelitian.....	88
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1.	Kesimpulan	89
5.2.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	: Data Tingkat Inflasi Kota Surabaya Selama Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2007 (Dengan Satuan Persentase)	71
Tabel 4.2.	: Data Jumlah Tempat Hiburan Kota Surabaya Selama Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2007 (Dalam Satuan Unit).....	72
Tabel 4.3.	: Data Pendapatan Perkapita Kota Surabaya Selama Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2007	73
Tabel 4.4.	: Data Penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya Selama Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2007	74
Tabel 4.5	: Hasil Uji Normalitas	75
Tabel 4.6	: VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>)	76
Tabel 4.7	: Hasil Korelasi <i>Rank Spearman</i>	77
Tabel 4.8	: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Dummy	79
Tabel 4.9	: Hasil Uji Kesesuaian Model	81
Tabel 4.10	: Hasil Uji t	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : <i>Demand Pull Inflation</i>	32
Gambar 2 : Cost Push Inflation.....	33
Gambar 3 : Kerangka Pikir	45
Gambar 4 : Kurva Distribusi Penolakan/ Penerimaan Hipotesis Secara Simultan	52
Gambar 5 : Kurva Distribusi Penolakan/ Penerimaan Hipotesis Secara Parsial.....	53
Gambar 6 : <i>d</i> Durbin-Watson.....	57

_juFAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Endah Wahyuni

Abstraksi

Sebagai ibukota propinsi Jawa Timur kota Surabaya merupakan salah satu pusat dagang dan sentra industri, maka pemerintahan kota dituntut mampu melaksanakan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya sumber - sumber pendapatan, salah satunya dari pajak khususnya pajak hiburan. Peningkatan pajak hiburan dari tahun ke tahun diupayakan untuk dapat meningkat, mengingat penerimaan pajak hiburan merupakan komponen dari pajak daerah yang potensial. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Faktor Tingkat Inflasi, Pendapatan Perkapita, Jumlah Tempat Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan dalam membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter di kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Pusat Statistik Jawa Timur dan kantor Dinas Pariwisata Daerah kota Surabaya. Mulai tahun 1999-2007, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda melalui uji F , uji-t dengan analisa klasik BLUE dan variable Dummy.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan hubungan yang nyata antara tingkat inflasi, pendapatan perkapita dan jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya. Dengan hasil pengujian F hitung $=14,873 > F \text{ tabel} = 3,36$ sedangkan secara parsial, tingkat inflasi (X_1) tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan hasil peroleh t hitung $= -1,024 < t \text{ tabel} = 2,201$, variabel parsial jumlah tempat hiburan (X_2) tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan hasil t hitung $= -1,008 < t \text{ tabel} = 2,201$, variabel pendapatan perkapita (X_3) berpengaruh nyata terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan nilai hitung t hitung $= 4,442 > t \text{ tabel} = 2,201$, nilai t hitung pada variabel Dummy sebesar $-2,861 < t \text{ tabel} = 2,201$, hali ini menyebabkan adanya perbedaan penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya.

Kata kunci : Penerimaan pajak hiburan,tingkat inflasi,pendapatan perkapita,jumlah tempat hiburan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala aspek. Pembangunan tersebut dilakukan tidak lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai; dapat dikatakan bahwa pembangunan itu berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah.

Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat, (Suparmoko, 2006: 5).

Disamping itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan dan terjadi pada tahun setelah orde baru berakhir yaitu tahun 1998-1999.

Hal-hal tersebut diawali pada masa Repelita I, dimana terjadi peristiwa “Malari” (Malapetaka Januari), maka 6 bulan sebelum berakhirnya

Repelita VI perekonomian Indonesia secara spontan diserang ‘Krismon’, laksana badai yang menghancurkan segala aspek kehidupan. Bukti terhadap gejolaknya kehidupan yang kita rasakan yaitu kurs rupiah anjlok terhadap Dollar pada tanggal 21 Juli dari Rp. 2.450 menjadi Rp. 2.700 (-6%); kemudian nilai rupiah ini mencapai titik terendah pada posisi Rp. 17.000 per US\$ pada tanggal 22 Januari 1998. Meskipun akhirnya mencapai kondisi stabil di posisi Rp. 8000 per US\$ sepanjang tahun 1999-2000. Kondisi seperti ini menjadikan pemahaman masyarakat mengenai krisis ekonomi masih telak dan dapat dikatakan teratasi pada era saat ini, yang dibuktikan dengan terlihat pertumbuhan ekonomi mulai mencatat angka positif pada tingkat 3-4% per tahun ataukah ekonomi hanya bisa pulih jika dolar kembali Rp. 5.000 per US\$. (Mubyarto, hal. 181).

Sedangkan pembangunan itu sendiri adalah suatu usaha untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan mendayagunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta yang berakibat terjadinya pertumbuhan dan perubahan pada masyarakat, (Larasati, 1986: 3).

Di sisi lain, Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, setiap daerah harus mampu menggali segala sumber dana yang ada di daerahnya sendiri,

yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing, sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan tanpa kecuali, dari pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun daerahnya sendiri dengan pemberian hak otonomi.

Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Siahaan, 2005: 14).

Adapun perwujudan dari otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah dalam

menghimpun pendapat sangatlah bervariasi, tergantung pada kondisi sumber daya alam daerah masing-masing. Hal ini berdampak pada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan. Selain itu juga, dapat dilihat dari kebutuhan belanja daerah untuk melaksanakan fungsi publik pada tiap-tiap daerah yang sifatnya bervariasi, dimana sarana-prasarana dan infrastruktur lainnya masih ada yang belum memadai.

Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur, juga merupakan kota terbesar ke-2 setelah Jakarta merupakan salah satu pusat dagang industri, maka pemerintah Kotamadya Surabaya harus dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya sebagian besar harus dengan kekuatan sendiri, dimana dibutuhkan sumber-sumber pendapatan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah.

Daerah Surabaya dimana penduduk, budaya, bahasa dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat bersifat heterogen; maka tepat sekali pemerintah melalui instansinya melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Karena dari jenis dan tempat hiburan inilah dapat diperoleh pajak, yaitu pajak hiburan.

Pajak hiburan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari pajak daerah bagi kota Surabaya, merupakan penerimaan daerah yang potensial, sehingga sangat relevan untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam sektor penerimaan pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, penerimaan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga (Anonim, 1999: 348).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemasukan pajak hiburan Kota Surabaya dilihat dari perkembangannya pada tahun 2003, sebesar Rp. 12.610.170.000; tahun 2004 sebesar Rp. 13.984.787.000; tahun 2005 sebesar Rp. 15.541.609.000; tahun 2006 sebesar Rp. 18.117.304.000; sedangkan pada tahun 2007 penerimaan pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 20.692.999.000 atau mengalami persentasi kenaikan sebesar 8%.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih mengintensifkan dan berupaya untuk meningkatkan pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki peran cukup besar, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan batasan-batasan masalah yang ada, maka penulis rumuskan masalah dengan uraian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh antara tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya?

2. Manakah faktor yang paling dominan antara tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya?
3. Seberapa jauh pengaruh faktor yang paling dominan terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita sebelum dan sesudah krisis moneter terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan antara tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita sebelum dan sesudah krisis moneter terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor yang paling dominan terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat melatih diri dalam menyelesaikan tugas, melalui penelitian lebih dalam terhadap permasalahan yang ada hingga mengetahui akan keadaan yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas

Setelah terbentuknya hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan referensi, baik bagi Universitas dalam hal perbendaharaan kepustakaan.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai sumber informasi para peneliti ilmu khususnya ilmu ekonomi untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi.